

**STUDI EVALUASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA
(PSG) MATA DIKLAT PROGRAM PRODUKTIF
DI SMK NEGERI 1 PETANG**

I Wayan Yudana¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan latar, masukan, proses, hasil, dan hambatan pelaksanaan pendidikan sistem ganda (PSG) di SMK Negeri 1 Petang. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2009/2010 dengan menggunakan evaluasi model CIPP. Data penelitian dikumpulkan dengan angket, studi dokumen, observasi, dan wawancara terstruktur. Data penelitian dianalisis secara deskriptif berdasarkan kriteria PSG.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel latar terkategori sangat siap dengan adanya dukungan pemerintah, masyarakat, dan institusi pasangan. Variabel masukan terkategori sangat siap dengan tersedianya kalender pendidikan, kurikulum, tenaga guru dan administrasi, teknisi/laboran, tenaga layanan khusus, pembiayaan, organisasi, dan administrasi. Variabel proses terkategori sangat siap dengan adanya perencanaan, pembelajaran, pelaksanaan PSG, monitoring dan evaluasi PSG. Variabel hasil terkategori sangat siap dengan adanya nilai rapor, nilai PSG, nilai uji kompetensi, dan nilai UN. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PSG di SMK Negeri 1 Petang terkategori sangat siap. Hambatan PSG tampak pada terlambatnya biaya, sarana, disiplin siswa, kurangnya DU/DI yang relevan, dan kurangnya koordinasi pengelolaan PSG.

Kata kunci: studi evaluasi, pendidikan sistem ganda, program produktif.

**AN EVALUATIVE STUDY OF PRODUCTIVE PROGRAM
OF DUAL SYSTEM EDUCATION (DSE) IMPLEMENTATION
AT SMK NEGERI 1 PETANG**

ABSTRACT

This study aimed at describing the context, input, process and product and the constraint in the Dual System Education (DSE) implementation at SMK Negeri 1 Petang. This study was conducted at SMK Negeri 1 Petang in the school year 2009/2010 by using the CIPP evaluation model. The data were collected by questionnaire, document study, observation, and structured interview. The data of the study were analyzed descriptively based on the DSE criteria.

The results showed that the context variable fell into category completely ready due to the support from the government, society, and competent institution. The input variable fell into category completely ready with the availability of calendar of education, curriculum, teachers, administration staff, technicians/laboratory technicians, special service staff, funding, and organization. The process variable fell into category

¹ Guru SMK Negeri 1 Petang, Kabupaten Badung

completely ready with the availability of planning, learning process, implementing DSE, monitoring and evaluating of DSE. The product variable fell into category completely ready with the availability of school report, DSE scores, competency test scores, and national evaluation scores. From the analysis, it can be concluded, the implementation of the DSE at SMK Negeri 1 Petang fell into category completely ready. The constraints in the DSE implementation can be seen at the cancellation in funding, limitation of facilities, lack of discipline on the part of the students, lack of relevant businesses/ industries and coordination in the DSE implementation.

Key words: evaluation study, dual system education, productive program

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan SDM, ternyata banyak permasalahan yang muncul dalam sistem pendidikan nasional. Permasalahan tersebut meliputi (1) rendahnya kualitas atau mutu pendidikan, yang ditandai oleh banyaknya lulusan sekolah yang tidak bisa diterima di dunia kerja, (2) belum meratanya pemerolehan akses bidang pendidikan, yang dibuktikan dengan banyaknya anak yang tidak sekolah atau putus sekolah, (3) tidak adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, yang ditandai oleh penyelenggaraan pendidikan yang tidak fokus pada suatu tujuan, (4) belum adanya demokratisasi pendidikan karena kebijakan pendidikan masih diatur pihak atasan, dan (5) masih terbatasnya peranserta masyarakat dalam dunia pendidikan, yang ditandai oleh kurangnya dukungan dana dari masyarakat (Nurhardjadm, 2008:215). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan yang baik sangat diperlukan.

Dengan berlakunya otonomi daerah, maka peran, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah dalam perencanaan dan pengelolaan pendidikan menjadi sangat besar. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya memuat adanya landasan pelaksanaan reformasi pendidikan (Uno, 2007:137).

Dalam implementasi kerangka landasan reformasi pendidikan, pihak sekolah dapat lebih mandiri dalam penyusunan strategi penyelenggaraan program sekolah, agar sesuai dengan tuntutan masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 2, tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20, tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia harus mengarah pada tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, seluruh jalur dan jenjang pendidikan

diharapkan dapat mengembangkan sumberdaya manusia secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan kreatif sesuai dengan potensinya.

SMK sebagai salah satu jenjang pendidikan diharapkan menyiapkan lulusan yang berkualitas pula. Untuk itu, dalam pendidikannya, siswa SMK dibekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) yang bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat. Dalam rangka pemberian keterampilan kecakapan hidup (*life skill*), SMK bekerja sama dengan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) sebagai institusi pasangan (Anwar, 2004:50-51).

Setelah mengikuti pendidikan di SMK, dengan bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bidangnya, lulusan SMK diharapkan dapat memilih berbagai jalur kehidupan. Menyadari hal tersebut, peran SMK betul-betul merupakan pendidikan terminal yang menghubungkan berbagai dimensi kepentingan, baik pemerintah, DU/DI, masyarakat, dan lulusan itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 0490/U/1992, bahwa tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah 1) mempersiapkan siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan/atau meluaskan pendidikan dasar, 2) meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, 3) meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, dan 4) SMK juga bertujuan menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional.

Di balik harapan tersebut di atas, kenyataan menunjukkan bahwa mutu lulusan SMK di Indonesia belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal itu disebabkan oleh kualitas lulusan SMK yang masih jauh dari kehendak pasar, lebih-lebih dengan terjadinya ketidaksesuaian antara "*supply*" lulusan dengan kecilnya "*demand*" sehingga terjadi persaingan yang ketat antarlulusan SMK di dunia kerja.

Untuk mengatasi rendahnya mutu lulusan SMK, sejak th 1994/1995 Depdiknas telah mencanangkan kebijakan yang dikenal dengan program Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Dalam PSG, siswa belajar sambil bekerja atau bekerja sambil belajar langsung dari sumber belajar (guru, pamong, fasilitator, empu, tukang, atau nama lain) melalui proses meniru, dan hasil belajar/bekerja merupakan ukuran keberhasilannya. Dalam PSG terdapat tanggung jawab bersama (*dual responsibilities*) antara pemerintah dan

masyarakat pemakai tenaga kerja, khususnya DU/DI, termasuk pemakaian jasa lainnya (Depdikbud, 1997:2).

Secara umum, pelaksanaan dan pemasyarakatan PSG memang telah berhasil mengubah persepsi dan pola pikir para pelaku pendidikan menengah kejuruan. Hal ini sejalan dengan arah reformasi pendidikan kejuruan, sehingga terjadi hubungan yang mengarah kepada terjadinya transformasi dan integrasi (Depdikbud, 1997:i). Dengan demikian, PSG terbukti bermanfaat atau memberi nilai tambah bagi DU/DI, sekolah, dan peserta didik.

SMK Negeri 1 Petang yang didirikan sebagai pelaksanaan desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah, telah berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui pelaksanaan PSG. Dengan demikian, tingkat pengangguran diharapkan dapat dikurangi (Dinas Pendidikan, 2006:3).

Walaupun demikian, pelaksanaan PSG di SMK Negeri 1 Petang berpotensi menimbulkan problematika. Di satu sisi, pemerintah dan masyarakat menginginkan adanya peningkatan mutu lulusan SMK, di sisi lain, beberapa faktor penting dalam kegiatan pendidikan di SMK Negeri 1 Petang masih terbatas, baik dari segi latar (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil (*product*) dengan berbagai aspeknya. Untuk itu, fokus kajian dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan PSG di SMK Negeri 1 Petang ditinjau dari segi latar (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil (*product*) serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif. Orientasi penelitian evaluatif ini adalah asesmen atau appraisal dari kualitas dan kuantitas kegiatan serta penelitian terhadap faktor-faktor yang membuat kegiatan tersebut berhasil. Dalam penelitian ini, analisisnya menggunakan pendekatan evaluasi program. Evaluasinya sendiri ditinjau dari empat variabel dalam model CIPP, yaitu latar, masukan, proses, dan hasil (Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield, 1986:169). Variabel latar meliputi kebijakan sekolah, dukungan pemerintah masyarakat, dan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Variabel masukan meliputi kurikulum, kalender pendidikan, ketenagaan, peserta didik, sarana pembelajaran, pembiayaan pendidikan, organisasi sekolah, dan administrasi sekolah. Variabel proses meliputi aspek proses pembelajaran, sosialisasi PSG,

perencanaan PSG, pelaksanaan PSG, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PSG. Variabel hasil meliputi hasil siswa PSG.

Untuk memperoleh data, digunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode utama yang digunakan dalam pengumpulan data secara kuantitatif adalah menggunakan angket (kuisioner). Item-item pada angket tersebut didalami lagi dalam metode pelengkap untuk memperoleh data secara kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan studi dokumen. Penggabungan metode tersebut antara lain untuk memberikan gambaran hasil penelitian yang lebih komprehensif karena keduanya saling mengisi kelemahan masing-masing.

Data dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil triangulasi data antara hasil angket, studi dokumentasi, dan pengamatan. Selanjutnya dianalisis dengan melakukan analisis Univariat, mengubah skor masing-masing variabel (CIPP) menjadi T-Skor, menentukan arah T-Skor variabel, dan menentukan arah T-Skor ke kwadran Glickman. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data hasil berbagai dokumen, hasil observasi pembelajaran, dan hasil wawancara atas hambatan pelaksanaan PSG. Reduksi hasil tersebut disajikan secara deskriptif dan disimpulkan untuk memperoleh hasil penelitian, serta selanjutnya diakomodasikan dan dikemukakan alternatif solusinya yang bersifat strategis dan praktis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, seluruh jalur dan jenjang pendidikan diharapkan dapat mengembangkan sumberdaya manusia secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan kreatif sesuai dengan potensinya (Lestari, 2006:4). SMK sebagai salah satu instrumen pembangunan, diharapkan mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi pada dunia kerja yang penuh persaingan (kompetisi). SMK juga diharapkan mampu menyiapkan calon tenaga kerja siap pakai.

Untuk mengatasi rendahnya mutu lulusan, SMK Negeri 1 Petang telah menerapkan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). PSG diterapkan berdasarkan (1) PP No. 29/1990 tentang Pendidikan Menengah, Bab XI pasal 29 ayat 1, "Penyelenggara sekolah menengah dapat bekerja sama dengan masyarakat terutama dunia usaha"; dan (2) PP No. 39, Bab VI pasal 8 ayat 1, "Peran

serta masyarakat dapat berbentuk pemberian kesempatan untuk magang dan atau latihan kerja”.

Dalam pelaksanaannya, PSG dilakukan dengan cara mendekatkan peserta didik ke dunia kerja sehingga dapat diintegrasikannya kepentingan dunia pendidikan dengan dunia industri. Para siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan di sekolah dan sekaligus mempelajari dunia industri. Dengan demikian, diharapkan adanya peningkatan mutu lulusan sehingga tingkat pengangguran yang merupakan beban sosial dapat dikurangi (Dinas Pendidikan, 2006:3).

Untuk itu, perlu dilakukan studi evaluasi tentang pelaksanaan PSG di SMK Negeri 1 Petang ditinjau dari variabel latar, masukan, proses, dan hasil serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan PSG tersebut. Pada variabel latar, hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan PSG mata diklat program produktif di SMK Negeri 1 Petang termasuk kategori **sangat siap**. Ketiga aspek dalam variabel latar memberikan dukungan terhadap pelaksanaan PSG. Sekolah telah memiliki beberapa kebijakan dalam rangka pelaksanaan PSG. Dukungan pemerintah melalui berbagai aspek telah terbukti. Peran masyarakat baik komite dan institusi pasangan dalam PSG juga telah ditunjukkan dengan beberapa jenis dukungan. Selain itu, sekolah juga telah melandaskan programnya dengan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan terarah.

Pada variabel masukan, pelaksanaan PSG mata diklat program produktif di SMK Negeri 1 Petang termasuk kategori **sangat siap**. Hal ini mengingat dalam pelaksanaan PSG, sekolah didukung oleh ketersediaan kalender pendidikan, ketenagaan, pembiayaan, organisasi sekolah, dan administrasi sekolah yang lengkap. Sekolah juga telah memiliki kurikulum yang disusun dengan melibatkan pemerintah, komite, DU/DI, dan LPMP. Namun demikian, kurikulum tersebut belum disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi. Pada hal, dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten merupakan bagian dari sistem kontrol, evaluasi pelaksanaan kurikulum, dan monitoring untuk mendapatkan kualitas yang dipersyaratkan (Sagala, 2007:124). Untuk aspek sarana pembelajaran, sekolah telah memilikinya walaupun belum tersedia sarana secara lengkap. Untuk pembimbing PSG, pihak sekolah masih melibatkan tenaga di luar guru program produktif. Dalam penerimaan siswa baru (PSB), pihak sekolah tidak melibatkan DU/DI melainkan masih dilaksanakan oleh pihak sekolah berdasarkan arahan Dinas Pendidikan. Selain itu, luas

lahan sekolah telah tersedia 1,2 hektar. Sekolah memiliki kelengkapan ruang pembelajaran umum (RPU) untuk *moving class* sesuai dengan standar sarana-prasarana SMK, meliputi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium fisika, kimia, biologi, dan laboratorium komputer. Sekolah juga memiliki Ruang Penunjang (RP) meliputi ruang ibadah, ruang UKS, gudang, rumah jaga, ruang sirkulasi dan kantin dengan luas sesuai standar serta sarana yang lengkap. Selebihnya, ruang pimpinan, ruang guru, ruang TU, ruang organisasi kesiswaan, jamban, dan tempat olahraga dengan luas sesuai standar. Sekolah juga memiliki Ruang Pembelajaran Khusus (RPK) yang dilengkapi dengan sarana, meliputi ruang pembibitan, laboratorium pengolahan hasil pertanian, *green house*, laboratorium pengolahan basah, laboratorium pengolahan kering, dan rumah kompos. Persyaratan lain untuk pelaksanaan PSG adalah kepemilikan lahan praktik yang memenuhi ketentuan luas minimal. Sekolah juga memiliki lahan praktik baru mencapai 1 ha untuk 259 siswa. Untuk pelayanan lulusan, pihak sekolah telah memiliki BKK yang telah melakukan seleksi dan penyaluran lulusannya ke dunia kerja yang relevan namun belum mampu memasarkan lulusannya secara langsung.

Pada variabel proses, pelaksanaan PSG di SMK Negeri 1 Petang termasuk kategori **sangat siap**. Hal ini terlihat dari adanya kesiapan dalam sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PSG. Walaupun demikian, untuk proses pembelajaran, dari 16 orang guru program produktif, baru 5 orang (31,25%) yang memiliki RPP yang lengkap dan sistematis. Seharusnya setiap mata pelajaran program produktif memiliki RPP secara lengkap dan sistematis pula. Peranan administrasi pembelajaran ini sangat penting, terlebih lagi jika dikaitkan dengan mutu pendidikan secara utuh. Salah satu tugas guru adalah menyusun administrasi pembelajaran sebagai salah satu bagian dari supervisi pendidikan dalam rangka mencapai pendidikan yang bermutu (Sagala, 2007:125).

Hasil observasi pelaksanaan pembelajaran guru produktif menunjukkan, guru telah melaksanakan pembelajaran dengan langkah-langkah dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup pembelajaran. Dalam mengakhiri pembelajaran, guru telah menyampaikan relevansi materi yang dipelajari siswa dengan kehidupan masa depan dalam rangka PSG.

Pada variabel hasil, pelaksanaan PSG mata diklat program produktif di SMK Negeri 1 Petang termasuk dalam kategori **sangat siap**. Dalam pelaksanaan PSG, prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran produktif memenuhi pencapaian rata-rata

8,15 dari ketuntasan minimal yang dipersyaratkan 7,00. Prestasi nilai PSG mata diklat program produktif, baik. Pencapaian nilai rata-rata UN mata pelajaran produktif mencapai 0,3 di atas nilai rata-rata nasional. Data nilai uji kompetensi dan nilai UN kelompok mata pelajaran produktif yang diperoleh 8,25 dan 7,00. Selain itu, persentase tingkat kelulusan siswa mencapai 98,67%. Walaupun demikian, pihak sekolah seyogyanya meningkatkan kinerjanya. Hal ini perlu dilakukan mengingat fungsi sekolah adalah sebagai pelaksana tugas untuk membimbing siswanya sebagai bagian dari masyarakat, pencipta realitas sosial, meneruskan, mempertahankan, dan mengembangkan kemampuan melalui ilmu dan penanaman nilai (Sagala, 2007:75).

Berdasarkan analisis CIPP, pelaksanaan PSG mata diklat program produktif di SMK Negeri 1 Petang didapatkan untuk variabel latar (*context*) arahnya **positif**, variabel masukan (*input*) arahnya **positif**, variabel proses (*process*) arahnya **positif** dan variabel hasil (*product*) **positif**. Variasi CIPP-nya menjadi (+ + + +). Berdasarkan kuadran Glickman, hasilnya termasuk dalam kategori **sangat siap**. Walaupun demikian, dalam variabel latar (*context*) masih terdapat kekurangan dalam kebijakan sekolah yang belum dilengkapi peraturan provinsi dan kabupaten. Sebagai dasar pelaksanaan program, sekolah sebaiknya melengkapi kebijakannya dengan berbagai peraturan dari lembaga yang menaunginya, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi. Di samping itu, Dinas pendidikan Kabupaten dan Provinsi bertugas membangun sistem persekolahan, menata, meredesain atau memodifikasi struktur organisasi sekolah serta memenuhi kebutuhan sekolah (Sagala, 2007:76). Dengan demikian, diharapkan tidak terjadinya pelaksanaan program yang berseberangan dengan sumber hukum yang lebih tinggi dari lembaga yang berwenang. Selain itu, perlu dilakukan pemanfaatan hasil penilaian guru, peningkatan peran komite dan DU/DI, peningkatan kerjasama dengan DU/DI, peningkatan sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah. Dalam variabel masukan (*input*) masih terdapat kekurangan terutama kurikulum yang belum disahkan oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten, dan kekurangan sarana-prasarana pembelajaran baik teori maupun praktik. Dalam variabel proses (*process*), belum semua guru program produktif memiliki program pembelajaran yang lengkap. Walaupun semua itu tidak berpengaruh besar terhadap pelaksanaan PSG, sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan sekolah, kepala sekolah seharusnya menindaklanjuti temuan ini dengan langkah-langkah praktis dalam menjalin kerja sama dengan komite dan DU/DI, dan pendekatan dengan Dinas

Pendidikan Provinsi dan Kabupaten untuk mendapatkan pedoman kebijakan tertulis tentang pelaksanaan PSG.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) mata diklat program produktif di SMK Negeri 1 Petang adalah (1) Keterlambatan dana pelaksanaan program sekolah, merupakan kendala yang dialami oleh kepala sekolah, pendidik, maupun tenaga kependidikan yang sepenuhnya menggunakan APBD Kabupaten Badung. Hal tersebut berakibat pada pelaksanaan anggaran yang sering tidak bisa tepat waktu dengan kegiatan sekolah. (2) Keterbatasan sarana-prasarana pembelajaran praktik, seperti lahan praktik yang masih menyewa, peralatan ruang pembelajaran umum (RPU), ruang pembelajaran khusus (RPK), dan ruang penunjang (RP) yang belum lengkap, termasuk kekurangan air bersih merupakan kendala yang dihadapi oleh seluruh warga sekolah. (3) Terbatasnya kompetensi keahlian siswa dalam bidang pertanian modern untuk merawat tanaman eksklusif dan bernilai ekonomi tinggi, merupakan masalah yang dihadapi oleh pihak DU/DI. Untuk membina keterampilan siswa ke arah pertanian modern memerlukan waktu dan proses cukup lama. (4) Kurangnya kedisiplinan siswa selama praktik kerja industri, merupakan masalah yang dihadapi oleh guru pembimbing PSG dan instruktur pendamping di DU/DI. Hal itu dinilai dari segi kekurangtepatan siswa dalam memanfaatkan jam kerja, kurangnya perhatian untuk melaksanakan praktik yang tepat secara sungguh-sungguh, dan sering terlambatnya kehadiran siswa di DU/DI. (5) Pihak sekolah kesulitan mendapatkan DU/DI yang dekat dan relevan dengan program keahlian. Pembimbing PSG sering mengalami benturan waktu bertugas di sekolah dan tugas membimbing siswa di DU/DI yang berakibat pada kekurangmaksimalan proses bimbingan gangguan terhadap pembelajaran di sekolah. (6) Belum terpenuhinya jumlah guru yang berpengalaman dalam pelaksanaan PSG, merupakan kendala yang dialami oleh pihak sekolah karena guru-guru yang bertugas di sekolah tersebut rata-rata belum berpengalaman dalam melaksanakan PSG. (7) Kurangnya koordinasi antarpembimbing PSG dan antara pembimbing dengan instruktur DU/DI, merupakan kendala yang dialami oleh pembimbing PSG. Akibatnya adalah, tidak semua siswa mendapatkan bimbingan secara menyeluruh dan proses bimbingan seolah-olah berjalan sendiri-sendiri. (8) Kegiatan PSG di DU/DI dirasakan mengganggu jam pelajaran normatif dan adaptif, merupakan kendala yang dialami oleh semua tenaga pendidik. Selama PSG berlangsung, siswa kelas XII otomatis tidak dapat belajar di sekolah. (9) Siswa kesulitan mendapatkan

tempat pemondokan selama PSG berlangsung di DU/DI yang dikemukakan oleh sebagian besar guru pembimbing mengingat DU/DI sebagian besar berlokasi di pedesaan.

IV. PENUTUP

Berdasarkan analisis data dan temuan penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. (1) Pelaksanaan PSG mata diklat program produktif di SMK Negeri 1 Petang ditinjau dari segi latar termasuk kategori **sangat siap**. Dalam pelaksanaan PSG, pihak sekolah telah memiliki kebijakan sekolah, dukungan pemerintah dan masyarakat, serta visi, misi, tujuan, dan sasaran PSG. Pada aspek kebijakan, pihak sekolah telah memiliki beberapa kebijakan sesuai dengan kriteria PSG yang meliputi peraturan pemerintah pusat dan beberapa kebijakan yang dibuat di sekolah. Walaupun kebijakan tertulis dari pemerintah provinsi dan kabupaten belum ada, hal tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan PSG. Pada aspek dukungan pemerintah dan masyarakat, terbukti pemerintah memberikan dukungan administratif, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, serta sarana-prasarana. Untuk dukungan komite, peran komite sekolah terbatas pada peran kontrol dan tidak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program sekolah. Untuk dukungan institusi pasangan (IP), tampak dalam penyusunan kurikulum, penyediaan tempat magang, penerimaan siswa magang, penyediaan fasilitas magang, dan penyediaan instruktur. Untuk upaya kerjasama sekolah dengan lembaga lain dalam melaksanakan magang guru, baru dilakukan kerja sama dengan satu lembaga saja. Untuk dokumen kemitraan PSG, telah dimilikinya 4 dokumen kerjasama/kemitraan. Di samping itu, pihak sekolah terbukti telah memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran PSG yang jelas dan rinci namun belum banyak disosialisasikan. (2) Pelaksanaan PSG mata diklat program produktif di SMK Negeri 1 Petang ditinjau dari segi masukan termasuk kategori **sangat siap**. Dalam pelaksanaan PSG, sekolah didukung oleh aspek ketersediaan kalender pendidikan, ketenagaan, pembiayaan, organisasi sekolah, dan administrasi sekolah yang lengkap. Sehubungan dengan kurikulum, sekolah telah memiliki kurikulum yang disusun dengan melibatkan pemerintah, komite, DU/DI, dan LPMP namun belum disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi. Untuk aspek sarana pembelajaran, belum tersedia sarana secara lengkap sesuai dengan persyaratan. Untuk pembimbing PSG, pihak sekolah masih melibatkan tenaga di luar guru program produktif. Dalam penerimaan

siswa baru (PSB), pihak sekolah tidak melibatkan DU/DI melainkan masih dilaksanakan oleh pihak sekolah berdasarkan arahan Dinas Pendidikan. Selain itu, luas lahan sekolah baru tersedia 1,2 hektar. Sekolah memiliki kelengkapan ruang pembelajaran umum (RPU) untuk *moving class* sesuai dengan standar sarana-prasarana SMK, meliputi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium fisika, kimia, biologi, dan laboratorium komputer. Sekolah juga memiliki Ruang Penunjang (RP) dengan sarana sesuai dengan persyaratan baru mencapai 54,55% meliputi ruang ibadah, ruang UKS, gudang, rumah jaga, ruang sirkulasi dan kantin dengan luas sesuai standar serta sarana yang lengkap. Selebihnya, ruang pimpinan, ruang guru, ruang TU, ruang organisasi kesiswaan, jamban, dan tempat olah raga dengan luas sesuai standar namun belum lengkap. Sekolah juga memiliki Ruang Pembelajaran Khusus (RPK) yang dilengkapi dengan sarana yang meliputi ruang pembibitan, laboratorium pengolahan hasil pertanian, *green house*, laboratorium pengolahan basah, laboratorium pengolahan kering, dan rumah kompos. Persyaratan lain untuk pelaksanaan PSG adalah sekolah juga memiliki lahan praktik baru mencapai 1 ha untuk 259 siswa. Untuk pelayanan terhadap lulusan, pihak sekolah telah memiliki BKK yang telah melakukan seleksi dan penyaluran lulusannya ke dunia kerja yang relevan. (3) Pelaksanaan PSG di SMK Negeri 1 Petang ditinjau dari variabel proses termasuk kategori **sangat siap**. Dalam pelaksanaan PSG, pihak sekolah telah memiliki kesiapan dalam sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PSG. Untuk proses pembelajaran yang menunjang program produktif, dari 16 orang guru program produktif, baru 5 orang (31,25%) yang memiliki RPP yang lengkap dan sistematis. Hasil observasi pelaksanaan pembelajaran terhadap 3 orang guru produktif menunjukkan, guru telah melaksanakan pembelajaran dengan langkah-langkah dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup pembelajaran. Dalam mengakhiri pembelajaran, guru telah menyampaikan relevansi materi yang dipelajari siswa dengan kehidupan masa depan dalam rangka PSG. (4) Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) mata diklat program produktif di SMK Negeri 1 Petang ditinjau dari segi hasil termasuk dalam kategori **sangat siap**. Dalam pelaksanaan PSG, aspek prestasi belajar siswa ditunjukkan dengan adanya dokumen perolehan nilai rapor kelompok mata pelajaran produktif memenuhi pencapaian rata-rata 8,15 dari ketuntasan minimal yang dipersyaratkan 7,00. Prestasi nilai PSG mata diklat program produktif sesuai dengan persyaratan, baik. Nilai rata-rata UN mata pelajaran produktif mencapai 0,3 di atas nilai rata-rata nasional. Nilai uji kompetensi

dan nilai UN kelompok mata pelajaran produktif yang diperoleh 8,25 dan 7,00. Persentase tingkat kelulusan siswa mencapai 98,67%. (5) Berdasarkan analisis CIPP, pelaksanaan PSG mata diklat program produktif di SMK Negeri 1 Petang didapatkan untuk variabel latar arahnya **positif**, variabel masukan, arahnya **positif**, variabel proses arahnya **positif** dan variabel hasil **positif**. Dengan demikian, variasi CIPP-nya menjadi (+ + + +). Berdasarkan kuadran Glickman, hasilnya termasuk dalam kategori **sangat siap**. (6) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PSG mata diklat program produktif di SMK Negeri 1 Petang adalah (a). keterlambatan dana pelaksanaan program sekolah, merupakan kendala yang dialami oleh kepala sekolah, pendidik, maupun tenaga kependidikan yang sepenuhnya menggunakan APBD Kabupaten Badung; (b). Keterbatasan sarana-prasarana pembelajaran praktik, termasuk kekurangan air bersih merupakan kendala yang dihadapi oleh seluruh warga sekolah; (c). Terbatasnya kompetensi keahlian siswa dalam bidang pertanian modern untuk merawat tanaman eksplosif dan bernilai ekonomi tinggi, merupakan masalah yang dihadapi oleh pihak DU/DI; (d). Kurangnya kedisiplinan siswa selama praktik kerja industri, merupakan masalah yang dihadapi oleh guru pembimbing PSG dan instruktur pendamping di DU/DI yang dinilai dari segi kekurangtepatan siswa dalam memanfaatkan jam kerja, kurangnya perhatian untuk melaksanakan praktik yang tepat secara sungguh-sungguh, dan sering terlambatnya kehadiran siswa di DU/DI; (e). Pihak sekolah kesulitan mendapatkan DU/DI yang dekat dan relevan dengan program keahlian yang berakibat pada tidak maksimalnya proses bimbingan di DU/DI dan sering terjadinya gangguan terhadap pembelajaran di sekolah; (f). Belum terpenuhinya jumlah guru yang berpengalaman dalam pelaksanaan PSG, merupakan kendala yang dialami oleh pihak sekolah; (g). Kurangnya koordinasi antarpembimbing PSG dan instruktur DU/DI, merupakan kendala yang dialami oleh pembimbing PSG sehingga siswa tidak mendapatkan bimbingan menyeluruh dalam pelaksanaan PSG di DU/DI; (h). Kegiatan PSG di DU/DI dirasakan mengganggu jam pelajaran normatif dan adaptif, merupakan kendala yang dialami oleh semua tenaga pendidik karena selama PSG, siswa kelas XII tidak dapat belajar di sekolah; (i). Siswa kesulitan mendapatkan tempat pemondokan selama PSG karena DU/DI sebagian besar berlokasi di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. 2004. *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Depdikbud. 1997. *Administrasi Pendidikan Sistem Ganda*. Jakarta: Ditmenjur.
- , 1997. *Pengelolaan Fasilitas dan Bahan Praktik Pendidikan Sistem Ganda*. Jakarta: Ditmenjur.
- , 1997. *Pengelolaan KBM dalam Pendidikan Sistem Ganda*. Jakarta: Ditmenjur.
- , 1997. *Penyusunan Kurikulum Pendidikan Sistem Ganda*. Jakarta: Ditmenjur.
- , 1997. *Sistem Penerimaan Siswa Baru Pendidikan Sistem Ganda*. Jakarta: Ditmenjur.
- , 1997. *Sistem Pembimbingan Siswa Pendidikan Sistem Ganda*. Jakarta: Ditmenjur.
- Disdik Kabupaten Badung. 2006. *Profil SMK Negeri 1 Petang*. Badung: SMKN 1 Petang.
- Lestari, Tita. 2006. *Pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Nurhardjado, Wahyu. 2008. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan (*Laporan Penelitian*)" dalam *Spirit Publik* Volume 4, Nomor 2 Halaman: 215 – 228, ISSN. 1907 – 0489, Oktober 2008.
- Sagala, Syaiful. 2007. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Stufflebeam, Daniel L. & Anthony J. Shinkfield. 1986. *Systematic Evaluation: A Self-Instructional Guide to Theory and Practice*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Uno, Hamzah B. 2007. *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.